

# PEMANFAATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG)

*Utilization of Public Sector Accounting and Internal Control in Performance of Regional Government Agencies (Case Study at the Regional Finance and Asset Agency of Kupang City)*

Adriano Frederico Farland Sogen<sup>1,a)</sup>, I Komang Arthana<sup>2,b)</sup>, Eve Ida Malau<sup>3,c)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : <sup>a)</sup> [sogenfarland@gmail.com](mailto:sogenfarland@gmail.com), <sup>b)</sup> [komang.arthana@staf.undana.ac.id](mailto:komang.arthana@staf.undana.ac.id),

<sup>c)</sup> [eve.malau@staf.undana.ac.id](mailto:eve.malau@staf.undana.ac.id),

## ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Tantangan yang dihadapi meliputi penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengawasan internal yang belum optimal, serta kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi yang terintegrasi memengaruhi kualitas data dan keandalan informasi keuangan, di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah menganalisis pemanfaatan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi di BKAD Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen resmi, laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman serta dibantu perangkat lunak NVivo 12. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik diterapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan didukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci :** Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, BKAD Kota Kupang, SIPD, SAP

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan fondasi utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan negara. Dalam konteks global, praktik pengelolaan keuangan negara yang baik telah menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas dan kapasitas suatu negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran di sektor publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi ini didorong oleh dua teori utama, yaitu *New Public Management* (NPM) yang menekankan efisiensi dan efektivitas, serta teori akuntabilitas publik yang menuntut pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan instansi strategis yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, berdasarkan data laporan realisasi anggaran periode 2018- 2022, terlihat adanya penurunan pada berbagai pos keuangan. Pendapatan daerah menurun sebesar 8,8 %, belanja dan transfer menurun 11,3%, serta pos pembiayaan mengalami penurunan drastis hingga 90,5%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan, meskipun BKAD telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran, terlihat adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang mengindikasikan tantangan dalam sinkronisasi sistem akuntansi dengan pengelolaan keuangan daerah. BKAD Kota Kupang menghadapi tantangan signifikan dalam mengadopsi basis akrual secara penuh sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terutama dalam pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, dan beban. Situasi ini tergambar melalui ketidakstabilan unsur-unsur keuangan dalam LRA disertai penurunan drastis pada bagian pembiayaan dan SILPA. Permasalahan mendasar yang dihadapi meliputi penerapan standar akuntansi yang belum sepenuhnya seragam, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana akuntansi sektor publik dimanfaatkan dan bagaimana sistem pengawasan internal berjalan, serta dampaknya terhadap kinerja BKAD kota Kupang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Manajemen Publik Baru**

Menurut Christopher Hood (1991) dalam artikel *A Public Management for All Seasons*, *New Public Management* (NPM) merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang bertujuan mentransformasi birokrasi tradisional menjadi sistem yang lebih efisien dan efektif. Hood mengidentifikasi tujuh doktrin kunci NPM yakni, manajemen profesional yang aktif dalam sektor publik, standar dan pengukuran kinerja yang eksplisit, penekanan lebih besar pada kontrol output, pemecahan unit-unit kerja dalam sektor publik, peningkatan kompetisi dalam sektor publik, pengadopsian gaya manajemen sektor swasta, dan penekanan pada disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Hood menyoroti bahwa NPM muncul sebagai respons terhadap kritik atas inefisiensi birokrasi dan kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan layanan publik.

### **Teori Akuntabilitas Publik**

Teori Akuntabilitas Publik yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009) merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang menjelaskan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (publik) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo

membagi akuntabilitas publik menjadi dua dimensi utama: akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas). Teori ini menekankan pentingnya konsep *value for money* yang berlandaskan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi (pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah), efisiensi (pencapaian *output* maksimal dengan input tertentu), dan efektivitas (tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial serta pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Mardiasmo, 2018). Dalam perkembangannya, akuntansi sektor publik telah mengalami transformasi signifikan di Indonesia, terutama setelah era reformasi yang menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Mahmudi (2016), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah, organisasi nirlaba, dan entitas publik lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomis. Berbeda dengan sektor swasta fokus utamanya bukan laba melainkan nilai guna, transparansi, dan akuntabilitas. Di Indonesia penerapannya berpedoman pada SAP berbasis akrual dan didukung teknologi informasi seperti SIPD.

### **Pengawasan Internal**

Menurut Mardiasmo (2018), pengawasan internal merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengamatan dalam konteks pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah merupakan aktivitas pemantauan berkelanjutan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan. Kegiatan ini mencakup monitoring terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Pengamatan dilakukan secara sistematis untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin, memastikan transparansi dalam alokasi sumber daya, dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan keuangan.

### **Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Bastian (2020) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah adalah tingkat pencapaian hasil kerja sesuai tugas dan fungsi yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikatornya meliputi aspek keuangan, kepatuhan, proses bisnis, dan kepuasan pemangku kepentingan. Kompetensi SDM, sistem informasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengawasan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan study kasus. Penelitian ini dilakukan di BKAD Kota Kupang selama November 2025 hingga Februari 2026. Sumber data meliputi wawancara mendalam dengan lima orang informan yaitu Kepala Badan, Kordinator Pengawasan Internal, Koordinator pengawasan Internal, Koordinator Pelaporan Kinerja, dan Staf Teknologi Informasi. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, peraturan daerah, dan dokumen organisasi.

Analisis data dilakukan melalui Empat tahap :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Untuk memperdalam analisis digunakan perangkat lunak Nvivo 12 guna mengolah transkrip wawancara dan mengidentifikasi kata kunci yang paling sering muncul.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Akuntansi Sektor Publik di BKAD Kota Kupang.

Berdasarkan hasil analisis frekuensi kata menggunakan Nvivo 12 dan wawancara mendalam, diketahui bahwa BKAD Kota Kupang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh sejak tahun 2015. Proses pencatatan, pengakuan aset, kewajiban hingga penyusunan laporan keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan peraturan menteri dalam negeri. Seluruh siklus pengelolaan keuangan didukung oleh (SIPD).

*"Kami sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sepenuhnya sejak tahun 2015. Setiap transaksi harus dicatat sesuai PSAP, mulai dari pengakuan aset, kewajiban, sampai dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari tujuh komponen wajib sesuai standar yang berlaku." — Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kota Kupang*

Laporan keuangan dihasilkan lengkap meliputi tujuh komponen wajib: LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Namun ditemukan kendala berupa perbedaan latar belakang pendidikan pegawai di organisasi perangkat daerah mitra kerja yang belum semuanya berlatar belakang Akuntansi.

*"Kadang masih ada perbedaan pemahaman antara satu staf dengan staf yang lain, apalagi di OPD. Mereka ada yang lulusan bukan akuntansi tapi ditugaskan mengelola keuangan. Jadi kami sering harus turun langsung ke OPD untuk memberikan pendampingan teknis." — Staf Bidang Akuntansi dan Aset BKAD Kota Kupang*

Upaya dilakukan BKAD adalah mengadakan bimbingan teknis rutin dan pendamping langsung ke OPD terakit.

### **Implementasi Pengawasan Internal di BKAD Kota Kupang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal di BKAD berjalan secara berlapir, mulai dari pengawasan melekat oleh atasan langsung, reviu oleh unit internal hingga koordinasi dengan inspektorat daerah. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi mulai menerapkan pendekatan berbasis resiko. Pemanfaatan SIPD juga memungkinkan pemantauan proses keuangan secara langsung dan tercatat

*"Pengawasan internal itu bukan hanya tugas inspektorat. Setiap pimpinan di sini punya tanggung jawab pengawasan terhadap bawahan dan unit kerjanya. Itu yang kami tanamkan, bahwa pengawasan adalah bagian dari tugas sehari-hari, bukan sesuatu yang dilakukan secara insidental." — Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kota Kupang.*

Kata "komitmen" dan "kepatuhan" yang muncul berdampingan dalam visualisasi ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Frekuensi kemunculan kata "komunikasi" dan "koordinasi" yang cukup tinggi juga mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang efektif membutuhkan mekanisme komunikasi yang lancar antara tim IT, OPD, dan unit terkait lainnya. Secara keseluruhan, *word frequency query* ini menggambarkan bahwa pengawasan internal di BKAD Kota Kupang merupakan suatu sistem yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek teknologi, kepemimpinan, manajemen risiko, dan komunikasi organisasi.

Efektivitas pengawasan internal di BKAD Kota Kupang sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. Mekanisme komunikasi yang cepat dan terbuka menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

*"Kalau ada kendala di OPD terkait sistem, kami langsung turun tangan. Tidak menunggu laporan formal dulu, karena itu akan memakan waktu dan bisa mengganggu proses pelaporan. Komunikasi langsung itu sangat penting untuk penyelesaian masalah yang cepat." — Staf Bidang Akuntansi Aset dan IT Sub Bidang Pelaporan Keuangan BKAD Kota Kupang*

Koordinasi intensif antara tim IT BKAD, OPD, dan Inspektorat menciptakan ekosistem pengawasan yang responsif dan adaptif. Pola komunikasi yang proaktif ini merupakan salah satu kekuatan utama dalam implementasi pengawasan internal di BKAD Kota Kupang.

### **Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di BKAD Kota Kupang**

Kinerja instansi pemerintah daerah di BKAD Kota Kupang dianalisis menggunakan fitur *Word Frequency Query* pada perangkat lunak NVivo 12. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam hasil wawancara informan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang dianggap penting dalam pencapaian kinerja instansi.

*"Kinerja kami diukur berdasarkan SAKIP. Setiap program dan kegiatan harus ada target yang jelas, dan di akhir tahun kami harus mempertanggungjawabkan*

*realisasinya. Laporan keuangan yang baik dan tepat waktu itu salah satu indikator kinerja utama kami." — Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kota Kupang.*

Menampilkan hasil *word frequency query* untuk topik Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di BKAD Kota Kupang. Kata yang paling dominan adalah "kinerja", diikuti oleh "laporan", "pemerintah", "instansi", "evaluasi", "pimpinan", "target", dan "akuntabilitas". Pola kata-kata ini mengindikasikan bahwa kinerja instansi pemerintah daerah dipandang terutama melalui lensa pelaporan, pencapaian target, dan evaluasi berkala yang dilakukan secara sistematis.

Kinerja BKAD Kota Kupang diwujudkan melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas horizontal, sementara informasi kinerja secara umum dapat diakses melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan. Mekanisme akuntabilitas yang bertahap dan terstruktur ini mencerminkan komitmen BKAD Kota Kupang terhadap prinsip *good governance*. Namun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan transparansi melalui penyediaan akses informasi kinerja yang lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya terbatas pada saluran formal melalui DPRD dan BPK.

### **Pemanfaatan Akuntansi Sektor Publik di BKAD Kota Kupang.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan akuntansi sektor publik di BKAD Kota Kupang telah diterapkan melalui penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penerapan SAP menjadi pedoman dalam proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan daerah sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Penggunaan SIPD membantu proses pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan Bastian (2019) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik.

Kondisi ini juga selaras dengan prinsip *new public management* yang menuntut efisiensi dan akurasi data meskipun demikian, keterbatasan kompetensi SDM di luar lingkungan BKAD menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang baik tidak cukup hanya bergantung pada sistem, melainkan juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Haryanto (2022) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Susanti dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan SAP berbasis akrual dan SIPD di BKAD Kota Kupang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

## **Implementasi Pengawasan Internal di BKAD Kota Kupang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan internal di BKAD Kota Kupang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan revidu terhadap pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan bertujuan meminimalkan risiko kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Penelitian Segah (2020) menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian risiko organisasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal di BKAD Kota Kupang berkontribusi dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan organisasi

## **Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di BKAD Kota Kupang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKAD Kota Kupang secara umum telah berjalan dengan baik dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kinerja tersebut tercermin dari kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan akuntansi sektor publik dan implementasi pengawasan internal mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

Mahsun (2018) menjelaskan bahwa kinerja sektor publik merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi pemerintah yang diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi publik dapat dinilai dari tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa kinerja instansi pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan penggunaan sumber daya, tetapi juga berdasarkan hasil yang dicapai serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKAD Kota Kupang telah mencerminkan upaya pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang didukung oleh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mentari, Anis, dan Yulitiawati (2022) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berkontribusi terhadap peningkatan

kinerja instansi pemerintah. Penelitian Syifanika, Zakaria, dan Yusuf (2024) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan transparansi memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan akuntansi sektor publik dan implementasi pengawasan internal di BKAD Kota Kupang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pencapaian kinerja organisasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Akuntansi sektor publik diterapkan sesuai SAP berbasis akrual dan didukung SIPD, namun kompetensi SDM yang belum merata menjadi kendala utama
2. Pengawasan internal berjalan efektif melalui lapisan pengendalian dan pendekatan berbasis resiko namun belum didukung dokumen resiko yang lengkap dan mutakhir.
3. Kinerja BKAD dinilai baik dengan dukungan budaya kerja dan kepemimpinan yang kuat, namun perlu memperluas orientasi pengukuran hingga tingkat *outcome*
4. Terdapat hubungan positif dan saling menguatkan antara akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan pencapaian kinerja instansi.

### Saran

1. BKAD Kota Kupang
  - a. Pemanfaatan Akuntansi Sektor Publik  
BKAD Kota Kupang perlu memperkuat program pengembangan kompetensi SDM di bidang akuntansi sektor publik secara berkelanjutan, terutama melalui program sertifikasi profesi akuntan pemerintah bagi staf kunci dan rekrutmen tenaga akuntansi yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Penyusunan modul pelatihan yang terstruktur dan berjenjang bagi operator keuangan pada tingkat OPD menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan kompetensi secara sistematis. Upaya peningkatan pemanfaatan SIPD juga perlu dilakukan melalui pengembangan fitur analitik yang dapat menyediakan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
  - b. Implementasi Pengawasan Internal  
BKAD Kota Kupang disarankan untuk mengformalisasi penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari sistem pengawasan internal, dengan menyusun peta risiko (*risk register*) yang komprehensif dan menetapkan strategi mitigasi yang terukur untuk setiap risiko yang teridentifikasi. Penguatan peran Inspektorat sebagai APIP juga perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan independensi, agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih strategis bagi perbaikan tata kelola. Mekanisme tindak lanjut atas temuan pengawasan perlu diperkuat dengan penetapan batas waktu yang jelas dan sistem pemantauan yang otomatis.
  - c. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  
BKAD Kota Kupang perlu mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja yang lebih berorientasi pada dampak (*outcome-based performance measurement*), tidak hanya pada *output* dan kepatuhan prosedural. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi kepada publik, misalnya melalui portal informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, merupakan langkah yang

sangat dianjurkan. Formalisasi sistem *reward* dan sanksi yang lebih terstruktur dan transparan juga perlu dikembangkan untuk menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif bagi peningkatan kinerja berkelanjutan.

2. Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang disarankan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi dan keuangan daerah, serta mendukung penguatan kelembagaan Inspektorat agar dapat berperan secara optimal sebagai APIP. Pembangunan ekosistem data terintegrasi yang menghubungkan seluruh OPD dengan BKAD secara *seamless* perlu diprioritaskan sebagai infrastruktur kunci dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari tingkat OPD dan masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga perspektif yang diperoleh lebih komprehensif. Pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan analisis kualitatif dengan data kuantitatif kinerja (seperti skor SAKIP dan opini BPK) dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian komparatif antara BKAD Kota Kupang dengan BKAD di daerah lain juga dapat menjadi topik yang menarik untuk mengidentifikasi best practices dalam pemanfaatan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal pada konteks yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S., & Nurdian. (2023). Pengaruh kematangan SPIP dan kualitas SAKIP terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 45–59.
- Bastian, I. (2022). *Akuntansi sektor publik* (Ed. 4). Salemba Empat.
- Damayanti, I. (2020). Analisis sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi pemerintah (Studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1852.95-102>
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public management: Studi kasus penerapan New Public Management dalam organisasi publik di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54–62. <https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>
- Febriana, L., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Pengaruh pengawasan internal, kompetensi SDM, dan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 437–448.
- Hakim, I. I. (2022). Pengawasan intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat tahun 2020: Sebuah tinjauan. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 29–38.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318–1330.
- Iskandar, N. I., Yulisuman, & Sefelia, N. (2025). Pengaruh SIPD dan e-procurement terhadap SAKIP melalui tata kelola yang baik. *Jurnal Inovasi Akuntansi Manajemen dan Bisnis*, 4(3), 575–586.

- Jatmiko, B. (2022). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 112–125.
- Jubaedah, E. (2023). Implementasi kebijakan transparansi keuangan di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(34), 288–299.
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2022). *Pengukuran kinerja instansi pemerintah*. BPFE.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik dan akuntabilitas publik*. Penerbit Andi.
- Mentari, M., Anis, F., & Yulitiawati, Y. (2022). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 12(1), 54–62.
- Nevi Costari, & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421)
- Pratiwi, R., & Sari, D. P. (2024). Efektivitas SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 78–92.
- Pratama, W. (2024). Pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap tata kelola pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 89–102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. (2014).
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2014).
- Saputra, Y. M., Menne, F., & Amri, N. F. (2025). Analisa perlakuan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 3(1), 59–66. <https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2544>
- Segah, B. (2020). Peranan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (The role of internal supervision in order to realize good governance). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 91–97.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam tinjauan teori dan praktik. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 7(2), 33–47.
- Syifanika, S. S. K. A., Zakaria, A., & Yusuf, M. (2024). Penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 102–109. <https://doi.org/10.56442/xfn7cm51>
- Wildayanti, S. D., Monoarfa, R., & Usman. (2023). Pengaruh pengendalian internal dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 115–122.